REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anggaran dalam ranah sektor publik merupakan sebuah instrumen dari kebijakan yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan. Anggaran merupakan alat perencanaan kegiatan pemerintah serta kegiatan pelayanan publik yang juga merupakan alat pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Kinerja pelayanan secara umum meruapakan aktivitas suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan referensi standar biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan organisasi secara efisien dan akuntabel.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku perwakilan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di Daerah bertugas mendorong percepatan dan turut melakukan evaluasi atas pelaksanaan anggaran satuan kerja (satker) dalam mencapai sasaran program dan kegiatan. Hal tersebut dilaksanakan sebagai langkah identifikasi permasalahan yang dihadapi satker sebelum memberikan rekomendasi atas hambatan yang dihadapi.

KPPN Poso merupakan salah satu kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan di bawah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah. KPPN Poso menatausahakan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) satker wilayah kerja yang

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

berada di Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Morowali Utara.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membuat Pemerintah Indonesia untuk menganut anggaran berbasis kinerja. Sedangkan dalam pelaksanaannya diakomodasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan lainnya yang mendukung. Penyusunan anggaran berbasis kinerja memfokuskan pada aspek manajemen strategik secara efektif dan efisien untuk mencapai keluaran (*output*) yang maksimal dari masukan (*input*) yang ada. Penyusunan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) ditetapkan oleh satuan kerja dengan mempertimbangkan beban kerja dan *unit cost* setiap kegiatan. Anggaran berbasis kinerja tidak hanya berorientasi pada *output* saja tetapi juga *outcome, benefit,* dan *impact*

Dalam organisasi sektor publik pendanaan dikaitkan dengan hasil yang dicapai melalui informasi kinerja yang terukur karena *performance-based budgeting* (Robinson dan Last, 2009) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran. Sederhananya, tujuan dan hasil dari pelaksanaan anggaran tertuang dalam bentuk indikator kinerja dan terdapat penyusunan anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut melalui informasi kinerja yang ada. Salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pelaksanaan anggaran adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggarannya. Nilai pagu anggaran satuan kerja

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

mengindikasikan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan berjalan dengan baik, pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan efisien, kesesuaian dengan perencanaan anggaran, dan adanya kepatuhan pada regulasi. Karena pentingnya hal tersebut, maka dibutuhkan langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran, Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan menggunakan alat ukur bernama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dilihat dari aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam pengawasannya, nilai IKPA dapat diketahui secara *realtime* melalui aplikasi aplikasi *Online* Monitoring SPAN (OMSPAN).

Capaian IKPA menggambarkan kinerja para pejabat perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran di tingkat satker. Kriteria atau parameter pengukuran kinerja menggambarkan pengukuran atas hasil yang lebih spesifik terkait tugas dan fungsi instansi pemerintah. Keberadaan IKPA juga membantu aktivitas manajemen untuk menentuka target periodik. Terlebih KPPN Poso, guna memantapkan jati diri dan identitasnya sebagai Kuasa BUN Daerah dalam mengelola keuangan negara.

Penggunaan IKPA digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dalam reformasi birokrasi. Namun,

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

nampaknya kebijakan ini belum berjalan sesuai dengan harapan, dilihat dari kinerja satuan kerja saat ini. Oleh karena itu perlu adanya pemeliharaan dan penyempurnaan dari IKPA ini supaya lebih kredibel.

Atas dasar permasalahan pokok di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso (Studi Kasus).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso?
2. Faktor apa yang paling dominan memengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja KPPN Poso.
2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan memengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja KPPN Poso.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca maupun objek penelitian. Maka dari itu terdapat dua jenis manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi kontrubusi ilmiah pada kajian tentang kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja yang bersumber dana dari APBN. Pelaksanaan anggaran dan *tools* untuk mengukurnya memang sudah ada namun masih kurang dilakukan analisis terkait faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru tentang faktor-faktor apa saja yang paling memengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis faktor-faktor apa saja yang paling memengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran. Melalui penelitian ini diharapkan satuan kerja dapat meningkatkan nilai IKPA mereka dan Ditjen Perbendaharaan dapat mengembangkan sistem penilaian IKPA yang telah ada.
3. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso.

repository.unsimar.ac.id